

Peran Transformational Leadership dalam Pengawasan Pendidikan Berbasis Penjaminan Mutu untuk Pencapaian Quality Education (SDGs 4) di SMP Negeri 7 Padang

Defril Syafrin^{1*}, Rahmi Malahayati², Irsyad Irsyad³, Syahril Syahril⁴, Novriyanti Achyar⁵
^{1,2,3,4,5}Universitas Negeri Padang

*Corresponding author, e-mail: defrilsyafrin1983@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kepemimpinan transformasional dalam pengawasan pendidikan berbasis penjaminan mutu untuk mendukung pencapaian *Quality Education* (SDGs 4) pada SMP Negeri 7 Kota Padang. Penelitian ini menjadi penting karena masih terdapat kesenjangan antara pelaksanaan pengawasan pendidikan yang cenderung administratif dengan tuntutan penjaminan mutu yang berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan, serta masih terbatasnya kajian yang mengintegrasikan kepemimpinan transformasional, supervisi akademik, dan penjaminan mutu dalam satu kerangka yang utuh di tingkat satuan pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap 15 informan yang terdiri atas kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, pengawas sekolah, dan tim penjaminan mutu internal sekolah. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional berperan dalam empat aspek utama, yaitu membangun visi mutu yang berorientasi SDGs 4, mentransformasi pengawasan menjadi proses reflektif dan kolaboratif, meningkatkan profesionalisme dan motivasi guru, serta mendorong terbentuknya budaya mutu di sekolah. Temuan ini menegaskan bahwa pengawasan pendidikan yang efektif tidak cukup hanya bersifat administratif, tetapi perlu diarahkan sebagai proses pembinaan profesional, berbasis data, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepemimpinan transformasional menjadi faktor strategis dalam mengintegrasikan pengawasan pendidikan dan penjaminan mutu guna mendukung terwujudnya pendidikan yang inklusif, adil, dan bermutu sesuai dengan agenda SDGs 4.

Kata kunci: Kepemimpinan Transformasional; Pengawasan Pendidikan; SDGs 4.

Abstract

This study aims to analyze the role of transformational leadership in quality assurance-based educational supervision to support the achievement of Quality Education (SDGs 4) at SMP Negeri 7 Kota Padang. This study is significant because there remains a gap between educational supervision practices that are predominantly administrative and the demands of quality assurance that emphasize continuous improvement in the quality of teaching and learning. In addition, studies that integrate transformational leadership, academic supervision, and quality assurance within a comprehensive framework at the school level are still limited. This research employed a qualitative approach with a case study design. Data were collected through in-depth interviews, observations, and document analysis involving 15 informants, including the principal, vice principal, teachers, school supervisor, and the internal quality assurance team. Data analysis was conducted interactively through data reduction, data display, and conclusion drawing and verification. The findings indicate that transformational leadership plays a role in four main aspects: building a quality-oriented vision aligned with SDGs 4, transforming supervision into a reflective and collaborative process, enhancing teachers' professionalism and motivation, and fostering a school quality culture. These findings highlight that effective educational supervision should not merely be administrative, but should function as a professional development process that is data-driven and oriented toward continuous improvement. This study concludes that transformational leadership is a strategic factor in integrating educational supervision and quality assurance to achieve inclusive, equitable, and quality education in line with SDGs 4.

Keywords: Transformational Leadership; Educational Supervision; SDGs4.

How to Cite: Syafrin, D. et al. (2026). Peran Transformational Leadership dalam Pengawasan Pendidikan Berbasis Penjaminan Mutu untuk Pencapaian Quality Education (SDGs 4) di SMP Negeri 7 Padang. *Naradidik: Journal of Education & Pedagogy*, 5(2), 402-412.



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2026 by author.

Pendahuluan

Pendidikan merupakan instrumen strategis dalam pembangunan manusia, peningkatan mobilitas sosial, dan penguatan daya saing bangsa. Dalam kerangka pembangunan global, Sustainable Development Goals (SDGs) tujuan ke-4 menegaskan pentingnya pendidikan yang inklusif, adil, bermutu, serta mendorong kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua ([UNESCO, 2016](#); [United Nations, 2015](#)). Agenda *quality education* dalam SDGs 4 tidak hanya menekankan pemerataan akses, tetapi juga menuntut peningkatan mutu proses pembelajaran, hasil belajar, relevansi pendidikan, serta tata kelola sekolah yang efektif dan akuntabel ([Unterhalter, 2019](#); [Tikly, 2017](#); [McGrath & Nolan, 2016](#)). Oleh karena itu, pencapaian SDGs 4 membutuhkan sistem pendidikan yang mampu menjalankan mekanisme penjaminan mutu secara sistematis, berkelanjutan, dan berbasis bukti. Dalam konteks manajemen pendidikan, penjaminan mutu dipahami sebagai proses berkelanjutan untuk memastikan bahwa layanan pendidikan memenuhi standar yang telah ditetapkan sekaligus mendorong perbaikan mutu secara terus-menerus ([Sallis, 2014](#); [Harvey & Green, 1993](#)). Mutu pendidikan tidak dapat hanya dilihat dari pemenuhan standar administratif, tetapi juga dari kualitas pengalaman belajar, efektivitas pembelajaran, kepemimpinan sekolah, budaya organisasi, dan capaian peserta didik ([Scheerens, 2016](#); [Creemers & Kyriakides, 2008](#)). Oleh sebab itu, sistem penjaminan mutu pendidikan harus terhubung dengan proses pengawasan, evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan di tingkat satuan pendidikan.

Di Indonesia, penguatan mutu pendidikan telah diformalkan melalui sistem penjaminan mutu yang mencakup penjaminan mutu internal dan eksternal. Namun, dalam praktiknya, implementasi penjaminan mutu di tingkat sekolah masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait konsistensi pelaksanaan, kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan data mutu, dan efektivitas supervisi sebagai instrumen pembinaan profesional. Dalam banyak konteks, pengawasan pendidikan masih cenderung bersifat administratif dan berorientasi pada kepatuhan dokumen, bukan pada peningkatan kualitas pembelajaran secara substantif. Kondisi ini sejalan dengan kritik dalam literatur supervisi pendidikan yang menyatakan bahwa supervisi yang terlalu birokratis sering kali gagal mendorong refleksi profesional dan perbaikan pedagogis guru ([Glickman, Gordon, & Ross-Gordon, 2018](#); [Sergiovanni & Starratt, 2007](#)).

Secara teoretis, pengawasan pendidikan atau supervisi akademik seharusnya berperan sebagai mekanisme strategis untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui observasi, dialog profesional, umpan balik, refleksi, dan tindak lanjut perbaikan ([Glickman et al., 2018](#); [Zepeda, 2017](#)). Supervisi modern tidak lagi dipahami sebagai kontrol hierarkis, melainkan sebagai proses kolaboratif yang mendukung pengembangan profesional guru dan peningkatan kapasitas sekolah ([Sullivan & Glanz, 2013](#); [Nolan & Hoover, 2011](#)). Dengan demikian, pengawasan pendidikan yang efektif harus mampu menjembatani antara standar mutu, praktik pembelajaran, dan hasil belajar peserta didik. Efektivitas pengawasan pendidikan sangat dipengaruhi oleh kualitas kepemimpinan sekolah. Dalam kajian kepemimpinan pendidikan, kepala sekolah memiliki peran penting dalam membentuk visi sekolah, membangun budaya mutu, meningkatkan kapasitas guru, dan mengarahkan perubahan organisasi ([Hallinger, 2003](#); [Leithwood, Harris, & Hopkins, 2008](#)). Salah satu pendekatan yang relevan adalah kepemimpinan transformasional, yaitu kepemimpinan yang menekankan kemampuan pemimpin dalam menginspirasi visi bersama, memberikan motivasi, mendorong inovasi, serta memperhatikan kebutuhan pengembangan individu ([Bass & Riggio, 2006](#); [Avolio & Bass, 2004](#)). Dalam konteks sekolah, kepemimpinan transformasional berkontribusi terhadap peningkatan komitmen guru, kepuasan kerja, budaya kolaboratif, dan efektivitas organisasi sekolah ([Leithwood & Jantzi, 2005](#); [Sun & Leithwood, 2012](#); [Nguni, Slegers, & Denessen, 2006](#)).

Sejumlah penelitian internasional menunjukkan bahwa kepemimpinan sekolah memiliki pengaruh signifikan terhadap hasil belajar peserta didik, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui kualitas guru, iklim sekolah, dan praktik pembelajaran ([Robinson, Lloyd, & Rowe, 2008](#); [Leithwood, Patten, & Jantzi, 2010](#); [Day et al., 2016](#)). [Robinson et al. \(2008\)](#) menegaskan bahwa kepemimpinan yang berfokus pada pembelajaran memiliki dampak yang kuat terhadap capaian siswa, terutama ketika pemimpin terlibat dalam pengembangan profesional guru dan pengelolaan kualitas pembelajaran. Sementara itu, [Leithwood et al. \(2008\)](#) menunjukkan bahwa kepemimpinan sekolah merupakan faktor kedua setelah pembelajaran di kelas yang berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik.

Dalam konteks pengawasan pendidikan berbasis penjaminan mutu, kepemimpinan transformasional dapat berfungsi sebagai penggerak perubahan yang mengintegrasikan supervisi akademik dengan siklus peningkatan mutu sekolah. Kepala sekolah yang transformasional tidak hanya menjalankan fungsi kontrol, tetapi juga membangun budaya reflektif, mendorong penggunaan data untuk pengambilan keputusan, serta menciptakan iklim kolaboratif yang mendukung inovasi pembelajaran ([Hallinger & Heck, 2010](#); [Marks & Printy, 2003](#)). Dengan demikian, pengawasan pendidikan berbasis penjaminan mutu membutuhkan kepemimpinan yang mampu mengubah supervisi dari praktik administratif menjadi proses pengembangan profesional dan peningkatan mutu berkelanjutan. Pada jenjang Sekolah Menengah Pertama, pengawasan pendidikan memiliki posisi penting karena fase ini merupakan masa transisi peserta didik dalam perkembangan akademik, sosial, dan karakter. Sekolah menengah pertama tidak hanya dituntut meningkatkan capaian akademik, tetapi juga membangun lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan mendukung perkembangan peserta didik secara utuh. Hal ini sejalan dengan prinsip SDGs 4 yang menekankan mutu, inklusivitas, kesetaraan, dan relevansi pendidikan ([UNESCO, 2016](#); [Unterhalter, 2019](#)). Oleh karena itu, pengawasan pendidikan pada jenjang SMP perlu diarahkan pada peningkatan kualitas pembelajaran, profesionalisme guru, serta penguatan budaya mutu sekolah.

SMP Negeri 7 Kota Padang sebagai salah satu satuan pendidikan di Kota Padang memiliki konteks yang relevan untuk dikaji karena merepresentasikan dinamika pelaksanaan pengawasan, penjaminan mutu, dan kepemimpinan sekolah di tingkat satuan pendidikan. Praktik pengawasan pendidikan di sekolah tidak dapat dilepaskan dari kapasitas kepemimpinan kepala sekolah dalam menggerakkan guru, mengelola program mutu, memanfaatkan hasil supervisi, dan menindaklanjuti evaluasi pembelajaran. Jika hasil pengawasan tidak digunakan sebagai dasar perbaikan, maka supervisi akan berhenti sebagai rutinitas administratif dan tidak menghasilkan perubahan substantif terhadap mutu pembelajaran.

Meskipun kajian mengenai kepemimpinan transformasional, supervisi akademik, dan penjaminan mutu telah berkembang luas, sebagian besar penelitian masih mengkaji ketiga aspek tersebut secara parsial dan belum mengintegrasikannya dalam satu kerangka yang utuh. Padahal, dalam konteks pencapaian *Quality Education* sebagaimana diamanatkan dalam SDGs 4, diperlukan model tata kelola pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan standar formal, tetapi juga mampu membangun budaya mutu, memperkuat kepemimpinan pembelajaran, mendorong supervisi yang reflektif, serta memastikan adanya perbaikan berkelanjutan. Keterbatasan kajian integratif ini semakin terlihat pada konteks pendidikan menengah pertama di Indonesia, yang hingga saat ini masih relatif minim dieksplorasi secara mendalam.

Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan berupa integrasi kepemimpinan transformasional, pengawasan pendidikan, dan penjaminan mutu dalam satu model pengawasan pendidikan berbasis penjaminan mutu yang berorientasi pada pencapaian *Quality Education (SDGs 4)*. Tidak hanya mengkaji hubungan antarvariabel, penelitian ini juga berupaya merekonstruksi fungsi pengawasan dari pendekatan administratif menuju pendekatan yang lebih reflektif, kolaboratif, dan berbasis data dalam siklus peningkatan mutu berkelanjutan. Sejalan dengan itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kepemimpinan transformasional dalam pengawasan pendidikan berbasis penjaminan mutu guna mendukung pencapaian *Quality Education SDGs 4* pada SMP Negeri 7 Kota Padang. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian kepemimpinan pendidikan, supervisi akademik, dan penjaminan mutu sekolah melalui pendekatan integratif. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi strategis dalam penguatan pengawasan pendidikan yang lebih reflektif, kolaboratif, berbasis data, dan berorientasi pada peningkatan mutu pembelajaran secara berkelanjutan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (*case study*) yang bertujuan untuk memahami secara mendalam peran kepemimpinan transformasional dalam pengawasan pendidikan berbasis penjaminan mutu pada konteks nyata di satuan pendidikan. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengungkap fenomena secara holistik dan kontekstual, terutama ketika batas antara fenomena dan konteks tidak dapat dipisahkan secara tegas ([Yin, 2018](#)). Penelitian dilaksanakan di SMP Negeri 7 Kota Padang sebagai satu kasus tunggal (*single case study*) yang dianggap representatif dalam menggambarkan dinamika pengawasan pendidikan, penjaminan mutu, dan kepemimpinan sekolah. Subjek penelitian berjumlah 15 informan yang dipilih secara purposive dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung dalam praktik pengawasan dan penjaminan mutu di sekolah. Informan tersebut terdiri atas kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, pengawas sekolah, serta tim penjaminan mutu internal sekolah. Pemilihan informan juga dikembangkan melalui teknik *snowball sampling* untuk memperoleh data yang lebih kaya dan mendalam sesuai kebutuhan penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali pengalaman, persepsi, dan praktik kepemimpinan transformasional serta supervisi akademik yang berlangsung di sekolah. Observasi digunakan untuk mengamati secara langsung proses supervisi, interaksi profesional, serta implementasi kegiatan penjaminan mutu. Sementara itu, studi dokumentasi dilakukan terhadap berbagai dokumen seperti program supervisi, laporan hasil supervisi, dokumen penjaminan mutu, serta kebijakan sekolah terkait peningkatan mutu.

Analisis data dilakukan secara interaktif dengan mengacu pada model [Miles, Huberman, & Saldaña \(2014\)](#), yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Proses analisis dilakukan secara berulang untuk menemukan pola, tema, dan hubungan antar konsep yang berkaitan dengan kepemimpinan transformasional, pengawasan pendidikan, dan penjaminan mutu. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode, *member check*, serta diskusi dengan sejawat (*peer debriefing*). Dalam analisisnya, penelitian ini menggunakan kerangka teori kepemimpinan transformasional, supervisi akademik, dan penjaminan mutu pendidikan yang dikaitkan dengan agenda *Quality Education* dalam SDGs 4. Selain itu, penelitian ini juga menjunjung tinggi prinsip etika penelitian dengan memastikan adanya persetujuan informan, menjaga kerahasiaan data, serta menjamin bahwa seluruh proses penelitian dilakukan secara objektif dan transparan.

Hasil dan Pembahasan

Membangun Visi Mutu yang Berorientasi Pada Pembentukan *Quality Education* (SDGs 4)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala sekolah memiliki peran strategis dalam membangun dan menginternalisasikan visi mutu yang berorientasi pada prinsip *Quality Education* sebagaimana diamanatkan dalam SDGs 4. Visi mutu di SMP Negeri 7 Kota Padang tidak hanya diformulasikan sebagai dokumen formal, tetapi ditransformasikan menjadi arah operasional yang memandu seluruh aktivitas sekolah, khususnya dalam peningkatan kualitas pembelajaran, inklusivitas, dan pemerataan kesempatan belajar. Dalam perspektif kepemimpinan transformasional, kemampuan kepala sekolah dalam mengartikulasikan visi yang jelas, inspiratif, dan berorientasi masa depan menjadi kunci dalam menyatukan persepsi serta membangun komitmen kolektif warga sekolah. Kepala sekolah (FY) menegaskan bahwa visi mutu tidak boleh berhenti pada tataran administratif, tetapi harus diwujudkan secara konkret dalam praktik pembelajaran di kelas:

“Visi mutu yang kami bangun di sekolah ini tidak hanya sekadar tertulis di dokumen, tetapi harus benar-benar dipahami dan dijalankan oleh seluruh guru. Kami menekankan bahwa kualitas pendidikan itu ada pada proses pembelajaran di kelas, bagaimana guru mampu menciptakan pembelajaran yang aktif, inklusif, dan bermakna bagi semua siswa. Kami juga selalu mengaitkan visi ini dengan tuntutan global seperti SDGs 4, sehingga guru memiliki kesadaran bahwa apa yang mereka lakukan di kelas memiliki dampak yang lebih luas.” (Wawancara, 29 Maret 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kepala sekolah berperan dalam mentransformasikan konsep mutu dari sekadar kepatuhan terhadap standar menjadi orientasi pada kualitas proses dan hasil belajar. Visi mutu yang dibangun tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga kontekstual, adaptif, dan relevan dengan kebutuhan peserta didik. Hal ini mencerminkan dimensi *inspirational motivation* dalam kepemimpinan transformasional, di mana pemimpin mampu menginspirasi anggota organisasi melalui visi yang bermakna. Hal serupa diperkuat oleh wakil kepala sekolah (DV) yang menekankan pentingnya konsistensi dalam mengintegrasikan visi mutu ke dalam program dan kegiatan sekolah:

“...Setiap program yang dirancang selalu mengacu pada peningkatan mutu pembelajaran. Kami selalu mengingatkan guru bahwa visi sekolah bukan hanya slogan, tetapi harus terlihat dalam praktik mengajar sehari-hari. Jadi semua kegiatan, baik supervisi maupun pelatihan, diarahkan untuk mendukung itu. Dalam setiap rapat, kami juga menekankan pentingnya refleksi terhadap proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Guru didorong untuk tidak hanya mengajar, tetapi juga mengevaluasi efektivitas metode yang digunakan. Selain itu, kami berusaha mengaitkan setiap program dengan kebutuhan nyata siswa di kelas. Dengan cara ini, visi mutu tidak hanya dipahami, tetapi benar-benar dijalankan secara konsisten oleh seluruh guru” (Wawancara, 31 Maret 2026).

Temuan ini menunjukkan bahwa visi mutu tidak hanya dikomunikasikan secara verbal, tetapi juga diinstitutionalisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program sekolah. Integrasi visi ke

dalam berbagai kegiatan menunjukkan adanya keselarasan antara kebijakan strategis dan praktik operasional, yang merupakan indikator penting dalam efektivitas kepemimpinan pendidikan. Dari perspektif guru, internalisasi visi mutu mulai tercermin dalam perubahan orientasi pembelajaran. Guru (WS) mengungkapkan bahwa penekanan pada mutu telah menggeser fokus pembelajaran dari sekadar penyelesaian materi menuju pemahaman siswa:

“Kami sekarang lebih diarahkan untuk memperhatikan bagaimana siswa memahami materi, bukan hanya menyelesaikan target kurikulum. Kepala sekolah sering menekankan bahwa keberhasilan pembelajaran bukan dari banyaknya materi yang disampaikan, tetapi dari sejauh mana siswa bisa memahami dan menerapkannya. (Wawancara, 4 April 2026).

Temuan ini mengindikasikan bahwa kepemimpinan transformasional berperan dalam membangun *shared vision* yang tidak hanya dipahami secara kognitif, tetapi juga terinternalisasi dalam praktik profesional guru. Visi mutu yang berorientasi pada SDGs 4 mendorong terjadinya pergeseran paradigma dari pembelajaran yang berorientasi pada konten menuju pembelajaran yang berpusat pada peserta didik (*student-centered learning*). Lebih lanjut, perubahan ini menunjukkan adanya transformasi pada tingkat epistemologis, di mana guru mulai memaknai pembelajaran sebagai proses konstruksi pengetahuan oleh siswa, bukan sekadar transfer informasi dari guru. Secara interpretatif, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan membangun visi mutu tidak hanya bergantung pada kejelasan rumusan visi, tetapi juga pada kemampuan pemimpin dalam mengomunikasikan, menginternalisasikan, dan mengimplementasikannya secara konsisten dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, kepemimpinan transformasional berfungsi sebagai mekanisme integratif yang menghubungkan antara dimensi kognitif (pemahaman visi), afektif (komitmen terhadap visi), dan perilaku (implementasi dalam praktik pembelajaran).

Temuan ini juga menunjukkan bahwa visi mutu berperan sebagai *cultural anchor* dalam membentuk budaya mutu sekolah. Ketika visi tersebut telah terinternalisasi, maka praktik peningkatan mutu tidak lagi bersifat instruksional atau top-down, tetapi berkembang menjadi kesadaran kolektif yang menggerakkan perubahan secara organik. Hal ini penting dalam konteks penjaminan mutu berkelanjutan, di mana keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh sistem, tetapi juga oleh budaya organisasi yang mendukung perbaikan terus-menerus. Visi mutu yang berorientasi pada SDGs 4 tidak hanya berfungsi sebagai arah strategis, tetapi juga sebagai landasan budaya kerja sekolah yang mendorong peningkatan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Temuan ini menegaskan bahwa kepemimpinan transformasional memiliki peran fundamental dalam menjembatani antara kebijakan global pendidikan dan praktik lokal di tingkat satuan pendidikan, sekaligus memperkuat efektivitas pengawasan pendidikan berbasis penjaminan mutu.

Pelaksanaan Pengawasan Pendidikan Berbasis Penjaminan Mutu

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan pendidikan di SMP Negeri 7 Kota Padang telah mulai mengarah pada pendekatan berbasis penjaminan mutu, meskipun dalam praktiknya masih ditemukan kecenderungan administratif. Pengawasan tidak lagi semata dipahami sebagai aktivitas kontrol, tetapi mulai dikembangkan sebagai bagian dari siklus penjaminan mutu yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan (*plan-do-check-act*). Dalam konteks ini, kepemimpinan transformasional berperan dalam menggeser orientasi pengawasan dari kepatuhan terhadap prosedur menuju peningkatan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan.

Secara operasional, pengawasan dilakukan melalui supervisi akademik, observasi pembelajaran di kelas, serta evaluasi perangkat pembelajaran. Namun, temuan menunjukkan bahwa fokus pengawasan masih cukup dominan pada aspek administratif, seperti kelengkapan perangkat pembelajaran, meskipun sudah mulai diintegrasikan dengan aspek reflektif terhadap praktik mengajar di kelas. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan berada dalam fase transisi menuju pendekatan yang lebih substantif. Kepala sekolah (FY) menjelaskan bahwa terdapat upaya untuk mengubah paradigma supervisi agar lebih berorientasi pada pengembangan profesional guru:

“...Selama ini supervisi memang lebih banyak melihat administrasi, tetapi sekarang kami mulai mengubah pendekatan itu. Kami tidak hanya memeriksa perangkat pembelajaran, tetapi juga masuk ke kelas untuk melihat bagaimana proses pembelajaran berlangsung. Setelah itu, kami berdiskusi dengan guru untuk memberikan masukan dan melihat apa yang bisa diperbaiki. Kami ingin supervisi ini menjadi sarana pembinaan, bukan sekadar penilaian. Jadi guru tidak merasa diawasi, tetapi merasa didampingi untuk berkembang.” (Wawancara, 30 Maret 2026).

Pernyataan ini menunjukkan adanya pergeseran dari pendekatan *inspection* menuju *developmental supervision*, di mana pengawasan berfungsi sebagai sarana pembelajaran profesional. Kepala sekolah tidak lagi berperan sebagai evaluator tunggal, tetapi sebagai fasilitator yang mendorong refleksi dan perbaikan

praktik pembelajaran. Upaya penguatan pengawasan berbasis penjaminan mutu juga terlihat dari pemanfaatan hasil supervisi sebagai dasar evaluasi sekolah. Salah satu guru (RD) menyampaikan:

“Hasil supervisi tidak hanya kami simpan sebagai laporan, tetapi kami bahas dalam rapat bersama guru. Dari situ kami melihat apa saja kelemahan yang sering muncul dalam pembelajaran. Kemudian kami mencoba merancang program perbaikan, misalnya melalui pelatihan atau diskusi kelompok. Jadi supervisi itu menjadi dasar untuk perencanaan ke depan. Walaupun memang belum semuanya berjalan maksimal, tetapi kami sudah mulai ke arah sana.” (Wawancara, 1 April 2026).

Temuan ini mengindikasikan bahwa pengawasan mulai berfungsi sebagai sumber data dalam pengambilan keputusan berbasis bukti (*data-driven decision making*). Namun, integrasi ini masih belum optimal karena tindak lanjut belum dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan pada seluruh aspek pembelajaran. Dari perspektif guru, pelaksanaan pengawasan juga mulai mengalami perubahan, meskipun masih dalam tahap adaptasi. Guru (MW) mengungkapkan:

“Sekarang supervisi tidak hanya melihat administrasi, tetapi juga bagaimana kami mengajar di kelas. Setelah observasi, biasanya ada diskusi dengan kepala sekolah atau wakil kepala sekolah. Kami diberi masukan tentang cara mengajar dan bagaimana melibatkan siswa. Itu cukup membantu, karena kami jadi tahu apa yang perlu diperbaiki. Tapi memang masih terasa seperti penilaian, jadi belum sepenuhnya terasa sebagai pembinaan.” (Wawancara, 5 April 2026).

Pernyataan ini menunjukkan bahwa transformasi pengawasan masih berada pada tahap awal, di mana perubahan pendekatan sudah mulai dirasakan, tetapi persepsi lama terhadap supervisi sebagai bentuk evaluasi masih cukup kuat. Hal ini menjadi tantangan dalam mengembangkan pengawasan yang benar-benar reflektif dan kolaboratif. Secara interpretatif, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan pendidikan berbasis penjaminan mutu berada pada fase transisional, yaitu pergeseran dari model administratif menuju model reflektif dan berbasis pengembangan profesional. Kepemimpinan transformasional berperan sebagai pendorong utama dalam perubahan ini melalui pembentukan paradigma baru, komunikasi yang dialogis, serta pemanfaatan hasil supervisi sebagai dasar perbaikan pembelajaran. Pelaksanaan pengawasan yang efektif dalam kerangka penjaminan mutu memerlukan integrasi antara observasi pembelajaran, refleksi profesional, dan tindak lanjut yang berkelanjutan. Ketiga aspek ini belum sepenuhnya berjalan secara sistematis, sehingga diperlukan penguatan dalam desain dan implementasi sistem pengawasan. Dalam hal ini, kepemimpinan transformasional memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pengawasan tidak hanya menjadi rutinitas administratif, tetapi menjadi instrumen strategis dalam peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

Meningkatkan Profesionalisme dan Motivasi Guru

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional berperan signifikan dalam meningkatkan profesionalisme dan motivasi guru di SMP Negeri 7 Kota Padang. Peningkatan tersebut tidak hanya terlihat pada aspek teknis pembelajaran, tetapi juga pada berkembangnya sikap reflektif, komitmen terhadap mutu, serta kesiapan guru dalam melakukan inovasi. Dalam konteks ini, kepala sekolah tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai *instructional leader* yang mampu mengarahkan, membina, dan memotivasi guru untuk terus berkembang secara profesional. Peningkatan profesionalisme guru tercermin dari adanya perubahan dalam praktik pembelajaran yang lebih reflektif dan adaptif. Guru tidak lagi sekadar menjalankan rutinitas mengajar, tetapi mulai mengembangkan kesadaran kritis untuk mengevaluasi efektivitas metode pembelajaran yang digunakan. Selain itu, guru juga menunjukkan keterbukaan terhadap pendekatan baru serta kemauan untuk meningkatkan kompetensi melalui kegiatan pengembangan profesional baik secara formal maupun informal.

Dari perspektif guru, kepemimpinan transformasional memberikan dampak langsung terhadap motivasi kerja dan semangat untuk berkembang. Guru (MW) mengungkapkan:

“Kami merasa lebih termotivasi karena ada perhatian dari pimpinan terhadap perkembangan kami. Setiap supervisi selalu ada masukan yang bisa kami gunakan untuk memperbaiki cara mengajar. Kami juga didorong untuk mencoba metode baru, sehingga pembelajaran tidak monoton. Selain itu, kami merasa diberikan kepercayaan untuk mengembangkan cara mengajar sesuai dengan kondisi siswa. Hal ini membuat kami lebih berani bereksperimen dalam pembelajaran. Dengan adanya dukungan seperti ini, kami jadi lebih semangat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas.” (Wawancara, 5 April 2026).

Hal serupa disampaikan oleh guru (DW) yang menekankan pentingnya dukungan dan kepercayaan dari pimpinan dalam meningkatkan motivasi kerja:

“Dengan adanya arahan dari kepala sekolah, kami jadi lebih percaya diri dalam mengajar. Kami merasa bahwa apa yang kami lakukan diperhatikan dan dihargai. Kami juga diberi ruang untuk mencoba hal-hal baru dalam pembelajaran. Bahkan ketika hasilnya belum maksimal, kami tetap diberikan dukungan untuk terus mencoba dan memperbaiki. Itu membuat kami lebih termotivasi untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Jadi bukan hanya bekerja, tetapi juga berkembang sebagai seorang guru.” (Wawancara, 6 April 2026).

Temuan ini menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional mampu membangun motivasi intrinsik guru melalui pendekatan yang suportif, apresiatif, dan berorientasi pada pengembangan. Guru tidak hanya termotivasi oleh tuntutan administratif atau penilaian kinerja, tetapi oleh kesadaran profesional untuk memberikan pembelajaran yang berkualitas. Dalam konteks ini, motivasi guru berkembang dari *extrinsic motivation* menuju *intrinsic motivation*, yang lebih berkelanjutan dan berdampak pada kualitas kinerja. Secara interpretatif, peningkatan profesionalisme dan motivasi guru dalam penelitian ini terjadi melalui beberapa mekanisme utama, yaitu: (1) pemberian umpan balik konstruktif yang mendorong refleksi dan perbaikan berkelanjutan, (2) penciptaan ruang bagi inovasi pembelajaran yang memungkinkan guru bereksperimen tanpa tekanan berlebihan, dan (3) penguatan kepercayaan diri guru melalui dukungan, apresiasi, dan pengakuan dari pimpinan. Ketiga mekanisme ini menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional berfungsi sebagai katalisator dalam pengembangan kapasitas guru (*capacity building*) secara berkelanjutan.

Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan profesionalisme guru tidak hanya bersifat individual, tetapi juga berdampak pada dinamika kolektif di lingkungan sekolah. Guru yang termotivasi cenderung lebih terbuka untuk berbagi praktik baik, berdiskusi dengan rekan sejawat, dan terlibat dalam komunitas belajar. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional turut mendorong terbentuknya *professional learning community* sebagai bagian dari penguatan mutu pendidikan. Selain itu, peningkatan profesionalisme guru juga berdampak langsung pada kualitas pembelajaran yang lebih inovatif dan berpusat pada peserta didik. Guru menjadi lebih reflektif dalam mengevaluasi pembelajaran, lebih adaptif terhadap kebutuhan siswa, serta lebih responsif terhadap dinamika kelas. Dalam konteks ini, profesionalisme guru tidak lagi dimaknai sebagai penguasaan materi semata, tetapi sebagai kemampuan untuk mengelola pembelajaran secara efektif, kreatif, dan kontekstual. Sebagai penguat, temuan ini kepala sekolah (FY) juga menegaskan bahwa pengembangan profesionalisme guru merupakan prioritas utama dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, seperti ungapannya berikut ini:

“Kami menyadari bahwa kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh kualitas guru. Oleh karena itu, kami terus berupaya memberikan pembinaan yang berkelanjutan melalui supervisi dan berbagai kegiatan pengembangan. Kami tidak hanya menilai, tetapi juga mendampingi guru agar mereka bisa berkembang. Kami juga berusaha menciptakan lingkungan yang mendukung guru untuk terus belajar. Guru harus merasa bahwa mereka tidak sendiri, tetapi didukung oleh sistem sekolah. Dengan demikian, motivasi untuk berkembang itu muncul dari dalam diri guru sendiri.” (Wawancara, 30 Maret 2026).

Dari temuan ini menjadi semakin jelas bahwa kepemimpinan transformasional memiliki peran strategis dalam meningkatkan profesionalisme dan motivasi guru sebagai bagian integral dari pengawasan pendidikan berbasis penjaminan mutu. Peningkatan mutu pendidikan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan sistem dan kebijakan yang formal, tetapi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia, khususnya guru sebagai aktor utama dalam proses pembelajaran. Dalam perspektif ini, kepemimpinan transformasional berfungsi sebagai *lever of change* yang mampu menggerakkan transformasi individu dan organisasi secara simultan (Leithwood & Jantzi, 2005; Day et al., 2016). Keberhasilan kepemimpinan transformasional tidak hanya terletak pada kemampuan mengarahkan, tetapi pada kapasitas pemimpin dalam membentuk *mindset* profesional guru melalui proses *visioning*, *empowerment*, dan *capacity building*. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kepala sekolah mampu membangun kepercayaan (*trust building*), memberikan dukungan psikologis, serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi pembelajaran berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan pandangan Bass & Riggio (2006) bahwa kepemimpinan transformasional mampu meningkatkan motivasi intrinsik dan komitmen anggota organisasi melalui inspirasi, perhatian individual, dan stimulasi intelektual.

Dalam konteks pengawasan berbasis penjaminan mutu, peningkatan profesionalisme guru juga berkaitan erat dengan terbentuknya praktik reflektif dan pembelajaran organisasi (*organizational learning*). Guru tidak hanya menjadi objek supervisi, tetapi berkembang menjadi subjek aktif yang secara sadar melakukan refleksi, evaluasi, dan inovasi pembelajaran. Temuan ini memperkuat argumen bahwa kepemimpinan sekolah yang efektif berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pembelajaran melalui pengembangan kapasitas guru dan penciptaan iklim sekolah yang mendukung (Robinson, Lloyd, & Rowe, 2008; Hallinger & Heck, 2010). Selain itu, peningkatan motivasi guru dalam penelitian ini menunjukkan

pergeseran dari motivasi eksternal menuju motivasi intrinsik, di mana guru terdorong untuk berkembang bukan karena tekanan administratif, tetapi karena kesadaran profesional. Hal ini sejalan dengan temuan [Nguni, Slegers & Denessen \(2006\)](#) yang menyatakan bahwa kepemimpinan transformasional berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja, komitmen organisasi, dan motivasi guru.

Kepemimpinan transformasional tidak hanya berdampak pada kinerja individu, tetapi juga pada efektivitas organisasi sekolah secara keseluruhan. Dalam kerangka *Quality Education (SDGs 4)*, profesionalisme dan motivasi guru merupakan faktor kunci dalam memastikan kualitas pembelajaran yang inklusif, relevan, dan berkelanjutan ([UNESCO, 2016; Unterhalter, 2019](#)). Guru yang profesional dan termotivasi cenderung mampu menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, adaptif terhadap kebutuhan siswa, serta responsif terhadap perubahan zaman. Oleh karena itu, kepemimpinan transformasional memiliki posisi strategis dalam menjembatani antara agenda global pendidikan dan implementasi praktis di tingkat satuan pendidikan. Temuan ini menegaskan bahwa kepemimpinan transformasional bukan hanya pendekatan kepemimpinan, tetapi merupakan strategi kunci dalam membangun ekosistem pendidikan yang berkualitas. Melalui penguatan profesionalisme dan motivasi guru, kepemimpinan transformasional mampu mendorong terwujudnya pengawasan pendidikan yang tidak hanya bersifat evaluatif, tetapi juga transformatif, reflektif, dan berorientasi pada peningkatan mutu pembelajaran secara berkelanjutan.

Mendorong Terbentuknya Budaya Mutu di Sekolah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional berperan penting dalam mendorong terbentuknya budaya mutu (*quality culture*) di SMP Negeri 7 Kota Padang. Budaya mutu tidak hanya dipahami sebagai pemenuhan standar formal, tetapi sebagai nilai, keyakinan, dan praktik bersama yang menekankan pentingnya perbaikan berkelanjutan dalam seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan. Dalam konteks ini, kepala sekolah berperan sebagai agen perubahan yang menanamkan kesadaran kolektif bahwa mutu merupakan tanggung jawab bersama, bukan sekadar kewajiban administratif. Budaya mutu tercermin dari adanya komitmen warga sekolah untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran, keterbukaan terhadap evaluasi, serta kemauan untuk melakukan inovasi. Proses ini dibangun melalui kepemimpinan yang konsisten dalam mengomunikasikan nilai mutu, memberikan teladan, serta menciptakan lingkungan yang mendukung praktik reflektif dan kolaboratif. Dari perspektif guru, budaya mutu mulai terinternalisasi dalam praktik keseharian. Guru (TS) mengungkapkan:

“Sekarang kami merasa bahwa peningkatan mutu itu memang menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya kepala sekolah. Kami lebih terbuka untuk menerima masukan, baik dari pimpinan maupun dari sesama guru. Dalam diskusi, kami sering membahas bagaimana cara memperbaiki pembelajaran di kelas. Kami juga mulai terbiasa untuk saling berbagi pengalaman mengajar. Hal ini membuat kami merasa bahwa kami belajar bersama, bukan bekerja sendiri-sendiri.” (Wawancara, 5 April 2026).

Hal serupa disampaikan oleh guru (TS) yang menekankan adanya perubahan dalam sikap profesional dan budaya kerja:

“Kami sekarang lebih terbiasa untuk melakukan evaluasi terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan. Kalau ada kekurangan, kami tidak langsung defensif, tetapi mencoba mencari solusi bersama. Kami juga lebih sering berdiskusi dengan rekan guru untuk memperbaiki metode mengajar. Kepala sekolah juga selalu mendorong kami untuk tidak takut mencoba hal baru. Dengan suasana seperti ini, kami merasa lebih nyaman untuk berkembang.” (Wawancara, 6 April 2026).

Temuan ini menunjukkan bahwa budaya mutu tidak hanya berdampak pada praktik pembelajaran, tetapi juga pada pola interaksi sosial dan profesional di sekolah. Guru menjadi lebih reflektif, kolaboratif, dan terbuka terhadap perubahan. Hal ini merupakan indikator penting dari terbentuknya *learning organization* di tingkat satuan pendidikan. Sebagai penguat, Wakil Kepala Sekolah (DS) menegaskan bahwa pembentukan budaya mutu merupakan fokus utama dalam kepemimpinannya:

“Kami ingin membangun budaya mutu di sekolah ini, bukan hanya menjalankan program secara administratif. Artinya, setiap guru harus memiliki kesadaran untuk terus memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Kami berusaha menciptakan lingkungan yang mendukung, di mana guru tidak takut untuk mencoba dan belajar dari kesalahan. Kami juga mendorong adanya kerja sama antar guru agar mereka bisa saling belajar. Budaya ini memang tidak bisa dibangun secara instan, tetapi harus melalui proses yang konsisten dan berkelanjutan.” (Wawancara, 30 Maret 2026)

Secara interpretatif, temuan ini menunjukkan bahwa budaya mutu terbentuk melalui proses internalisasi nilai yang didorong oleh kepemimpinan transformasional. Pemimpin tidak hanya menetapkan standar, tetapi juga membangun sistem nilai yang mengarahkan perilaku warga sekolah. Dalam konteks ini, budaya mutu berfungsi sebagai *cultural anchor* yang mengikat komitmen kolektif terhadap peningkatan mutu pendidikan. Budaya mutu yang terbentuk juga memperkuat implementasi penjaminan mutu di sekolah. Ketika nilai mutu telah menjadi bagian dari budaya organisasi, maka praktik pengawasan, evaluasi, dan perbaikan tidak lagi dipandang sebagai beban, tetapi sebagai kebutuhan profesional. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan penjaminan mutu tidak hanya bergantung pada sistem formal, tetapi juga pada kekuatan budaya organisasi. Kepemimpinan transformasional memiliki peran fundamental dalam membentuk budaya mutu sebagai bagian dari pengawasan pendidikan berbasis penjaminan mutu. Budaya mutu yang kuat akan menjadi fondasi bagi terwujudnya peningkatan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan serta mendukung pencapaian *Quality Education (SDGs 4)* di tingkat satuan pendidikan.

Pembahasan

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional memiliki peran strategis dalam memperkuat pengawasan pendidikan berbasis penjaminan mutu di SMP Negeri 7 Kota Padang. Peran tersebut tampak melalui empat aspek utama, yaitu membangun visi mutu yang berorientasi SDGs 4, mentransformasi pengawasan menjadi proses reflektif dan kolaboratif, meningkatkan profesionalisme dan motivasi guru, serta mendorong terbentuknya budaya mutu sekolah. Keempat aspek ini saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan proses dalam mendukung pencapaian *Quality Education* sebagaimana ditekankan dalam SDGs 4.

Pertama, temuan mengenai kemampuan kepala sekolah dalam membangun visi mutu yang berorientasi SDGs 4 memperkuat pandangan bahwa kepemimpinan transformasional berperan penting dalam membangun arah perubahan organisasi sekolah. Kepala sekolah tidak hanya berfungsi sebagai administrator, tetapi sebagai pemimpin perubahan yang mampu mengartikulasikan visi, membangun komitmen kolektif, dan mengarahkan warga sekolah pada tujuan peningkatan mutu pembelajaran. Hal ini sejalan dengan [Bass & Riggio \(2006\)](#) yang menjelaskan bahwa kepemimpinan transformasional ditandai oleh kemampuan pemimpin untuk memberikan motivasi inspiratif, membangun visi bersama, dan mendorong anggota organisasi mencapai tujuan yang lebih tinggi. Dalam konteks sekolah, [Leithwood & Jantzi \(2005\)](#) juga menegaskan bahwa kepemimpinan transformasional dapat meningkatkan komitmen guru dan efektivitas organisasi melalui penguatan visi bersama. Temuan ini juga mendukung pemikiran [Hallinger \(2003\)](#) bahwa kepemimpinan sekolah yang efektif harus mampu menghubungkan visi institusional dengan peningkatan kualitas pembelajaran. Visi mutu yang dibangun kepala sekolah tidak berhenti sebagai dokumen formal, tetapi diinternalisasikan dalam program supervisi, pelatihan guru, dan evaluasi pembelajaran. Dengan demikian, visi mutu berfungsi sebagai *organizational compass* yang mengarahkan tindakan kolektif warga sekolah. Dalam kaitannya dengan SDGs 4, visi tersebut menjadi penting karena *Quality Education* tidak hanya berkaitan dengan akses pendidikan, tetapi juga dengan kualitas proses pembelajaran, inklusivitas, pemerataan kesempatan belajar, dan hasil belajar yang bermakna ([UNESCO, 2016; Unterhalter, 2019](#)).

Kedua, temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan pendidikan mulai bergeser dari pendekatan administratif menuju pendekatan reflektif dan kolaboratif. Pergeseran ini penting karena supervisi pendidikan modern tidak lagi dipahami sebagai kontrol hierarkis, melainkan sebagai proses pembinaan profesional yang membantu guru memperbaiki praktik pembelajaran. [Glickman, Gordon, & Ross-Gordon \(2018\)](#) menyatakan bahwa supervisi akademik yang efektif harus mendorong dialog profesional, refleksi, dan tindak lanjut perbaikan. Hal ini juga sejalan dengan [Zepeda \(2017\)](#) yang menekankan bahwa supervisi pembelajaran harus diarahkan pada peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran, bukan sekadar pemeriksaan dokumen administratif. Dalam konteks SMP Negeri 7 Kota Padang, pengawasan pendidikan mulai diarahkan pada observasi kelas, diskusi pascasupervisi, dan pemanfaatan hasil supervisi sebagai dasar evaluasi sekolah. Namun, temuan juga menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan masih berada dalam fase transisi karena unsur administratif masih cukup dominan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perubahan paradigma supervisi membutuhkan proses yang berkelanjutan. [Sullivan & Glanz \(2013\)](#) menegaskan bahwa supervisi yang efektif memerlukan relasi kolaboratif antara pemimpin dan guru agar pengawasan tidak dipersepsikan sebagai penilaian semata, tetapi sebagai proses pendampingan profesional.

Ketiga, penelitian ini menemukan bahwa kepemimpinan transformasional berkontribusi terhadap peningkatan profesionalisme dan motivasi guru. Guru menjadi lebih terbuka terhadap umpan balik, lebih reflektif dalam mengevaluasi pembelajaran, dan lebih termotivasi untuk mencoba metode baru. Temuan ini memperkuat studi [Nguni, Slegers & Denessen \(2006\)](#) yang menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional berpengaruh terhadap kepuasan kerja, komitmen organisasi, dan motivasi guru. Selain itu,

[Day, Gu & Sammons \(2016\)](#) menegaskan bahwa pemimpin sekolah yang berhasil mampu meningkatkan hasil pendidikan melalui penguatan kapasitas guru, pengembangan profesional, dan penciptaan iklim sekolah yang mendukung. Peningkatan profesionalisme guru dalam penelitian ini juga dapat dipahami sebagai bagian dari *capacity building*. Kepala sekolah tidak hanya menilai kinerja guru, tetapi memberikan dukungan, kepercayaan, dan ruang inovasi. Hal ini sesuai dengan [Robinson, Lloyd & Rowe \(2008\)](#) yang menyatakan bahwa kepemimpinan yang berfokus pada pembelajaran memiliki dampak kuat terhadap hasil belajar siswa, terutama ketika pemimpin terlibat dalam pengembangan profesional guru. Dengan demikian, profesionalisme guru menjadi jembatan penting antara pengawasan pendidikan dan pencapaian mutu pembelajaran. Dalam kerangka SDGs 4, guru yang profesional dan termotivasi merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya pendidikan yang inklusif, relevan, dan berkualitas ([UNESCO, 2016; Tikly, 2017](#)).

Keempat, temuan penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional mendorong terbentuknya budaya mutu di sekolah. Budaya mutu tercermin dalam keterbukaan terhadap evaluasi, kemauan untuk memperbaiki pembelajaran, kolaborasi antar guru, dan kesadaran bahwa mutu merupakan tanggung jawab bersama. Temuan ini sejalan dengan [Sallis \(2014\)](#) yang menekankan bahwa mutu pendidikan tidak hanya ditentukan oleh sistem formal, tetapi juga oleh budaya organisasi yang mendukung perbaikan berkelanjutan. Dalam perspektif budaya organisasi, [Schein \(2010\)](#) menjelaskan bahwa budaya terbentuk melalui nilai, keyakinan, dan praktik bersama yang memengaruhi perilaku anggota organisasi.

Budaya mutu yang mulai terbentuk di SMP Negeri 7 Kota Padang menunjukkan bahwa penjaminan mutu tidak hanya berjalan melalui mekanisme administratif, tetapi melalui internalisasi nilai mutu dalam praktik keseharian sekolah. Ketika guru mulai melihat evaluasi dan supervisi sebagai kebutuhan profesional, maka pengawasan pendidikan berubah menjadi bagian dari proses pembelajaran organisasi. [Hallinger & Heck \(2010\)](#) menyatakan bahwa kepemimpinan kolaboratif dapat meningkatkan kapasitas sekolah dan memperkuat pembelajaran kolektif. Budaya mutu menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan penjaminan mutu pendidikan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa kepemimpinan transformasional berperan sebagai penghubung antara pengawasan pendidikan, penjaminan mutu, dan pencapaian *Quality Education* SDGs 4. Peran ini tidak hanya bersifat manajerial, tetapi juga transformatif karena mampu mengubah cara guru memahami supervisi, mutu, dan pembelajaran. Kepemimpinan transformasional menjadikan pengawasan tidak hanya sebagai aktivitas evaluatif, tetapi sebagai proses reflektif, kolaboratif, dan berorientasi pada pengembangan profesional. Hal ini sejalan dengan [Marks & Printy \(2003\)](#) yang menegaskan pentingnya integrasi antara kepemimpinan transformasional dan kepemimpinan instruksional dalam meningkatkan kinerja sekolah.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepemimpinan transformasional berperan strategis dalam memperkuat pengawasan pendidikan berbasis penjaminan mutu untuk mendukung pencapaian *Quality Education* (SDGs 4) di SMP Negeri 7 Kota Padang. Peran tersebut tercermin melalui pembangunan visi mutu yang berorientasi SDGs 4, transformasi supervisi menjadi proses reflektif dan kolaboratif, peningkatan profesionalisme serta motivasi guru, dan penguatan budaya mutu sekolah. Kepemimpinan transformasional mampu mengarahkan supervisi dari sekadar fungsi administratif menjadi pembinaan profesional melalui observasi, refleksi, umpan balik, dan tindak lanjut pembelajaran. Dampaknya terlihat pada meningkatnya praktik pembelajaran yang lebih inovatif, reflektif, dan berpusat pada peserta didik, serta tumbuhnya budaya kolaborasi dan perbaikan berkelanjutan. Secara teoretis, penelitian ini memperkuat integrasi kepemimpinan transformasional, supervisi akademik, dan penjaminan mutu sebagai dasar pengembangan model pengawasan pendidikan. Secara praktis, kepala sekolah perlu mengoptimalkan perannya sebagai *instructional leader* yang menjadikan supervisi sebagai sarana pengembangan profesional guru dan penguatan budaya mutu sekolah. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan desain studi kasus tunggal sehingga temuan bersifat kontekstual dan belum menguji hubungan kuantitatif antara kepemimpinan transformasional dengan hasil belajar siswa sebagai indikator *Quality Education*. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan studi multikasus atau *mixed methods* agar menghasilkan temuan yang lebih generalisabel, sekaligus mengkaji hubungan kepemimpinan transformasional, pengawasan pendidikan, budaya organisasi, kepemimpinan instruksional, pemanfaatan teknologi, dan hasil belajar siswa secara lebih komprehensif dalam mendukung penjaminan mutu pendidikan dan pencapaian SDGs 4.

Daftar Pustaka

- Avolio, B. J., & Bass, B. M. (2004). *Multifactor leadership questionnaire: Manual and sampler set* (3rd ed.). Mind Garden.
- Bass, B. M., & Riggio, R. E. (2006). *Transformational leadership* (2nd ed.). Lawrence Erlbaum Associates.
- Creemers, B. P. M., & Kyriakides, L. (2008). *The dynamics of educational effectiveness: A contribution to policy, practice and theory in contemporary schools*. Routledge.
- Day, C., Gu, Q., & Sammons, P. (2016). The impact of leadership on student outcomes: How successful school leaders use transformational and instructional strategies to make a difference. *Educational Administration Quarterly*, 52(2), 221–258.
- Glickman, C. D., Gordon, S. P., & Ross-Gordon, J. M. (2018). *SuperVision and instructional leadership: A developmental approach* (10th ed.). Pearson.
- Hallinger, P. (2003). Leading educational change: Reflections on the practice of instructional and transformational leadership. *Cambridge Journal of Education*, 33(3), 329–351.
- Hallinger, P., & Heck, R. H. (2010). Collaborative leadership and school improvement: Understanding the impact on school capacity and student learning. *School Leadership & Management*, 30(2), 95–110.
- Harvey, L., & Green, D. (1993). Defining quality. *Assessment & Evaluation in Higher Education*, 18(1), 9–34.
- Leithwood, K., Harris, A., & Hopkins, D. (2008). Seven strong claims about successful school leadership. *School Leadership & Management*, 28(1), 27–42.
- Leithwood, K., & Jantzi, D. (2005). A review of transformational school leadership research 1996–2005. *Leadership and Policy in Schools*, 4(3), 177–199.
- Leithwood, K., Patten, S., & Jantzi, D. (2010). Testing a conception of how school leadership influences student learning. *Educational Administration Quarterly*, 46(5), 671–706.
- Marks, H. M., & Printy, S. M. (2003). Principal leadership and school performance: An integration of transformational and instructional leadership. *Educational Administration Quarterly*, 39(3), 370–397.
- McGrath, S., & Nolan, A. (2016). Learning for sustainable development: Aligning education with the Sustainable Development Goals. *International Journal of Educational Development*, 50, 1–3.
- Nguni, S., Slegers, P., & Denessen, E. (2006). Transformational and transactional leadership effects on teachers' job satisfaction, organizational commitment, and organizational citizenship behavior. *School Effectiveness and School Improvement*, 17(2), 145–177.
- Nolan, J. F., & Hoover, L. A. (2011). *Teacher supervision and evaluation: Theory into practice* (3rd ed.). Wiley.
- Robinson, V. M. J., Lloyd, C. A., & Rowe, K. J. (2008). The impact of leadership on student outcomes: An analysis of the differential effects of leadership types. *Educational Administration Quarterly*, 44(5), 635–674.
- Sallis, E. (2014). *Total quality management in education* (3rd ed.). Routledge.
- Scheerens, J. (2016). *Educational effectiveness and ineffectiveness: A critical review of the knowledge base*. Springer.
- Schein, E. H. (2010). *Organizational culture and leadership* (4th ed.). Jossey-Bass.
- Sergiovanni, T. J., & Starratt, R. J. (2007). *Supervision: A redefinition* (8th ed.). McGraw-Hill.
- Sullivan, S., & Glanz, J. (2013). *Supervision that improves teaching and learning: Strategies and techniques* (4th ed.). Corwin.
- Sun, J., & Leithwood, K. (2012). Transformational school leadership effects on student achievement. *Leadership and Policy in Schools*, 11(4), 418–451.
- Tikly, L. (2017). The future of education for all as a global regime of educational governance. *Comparative Education Review*, 61(1), 22–57.
- UNESCO. (2016). *Education 2030: Incheon declaration and framework for action*. UNESCO.
- United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development*. United Nations.
- Unterhalter, E. (2019). The many meanings of quality education: Politics of targets and indicators in SDG 4. *Global Policy*, 10(S1), 39–51.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Sage.
- Zepeda, S. J. (2017). *Instructional supervision: Applying tools and concepts* (4th ed.). Routledge.